



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI**  
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 6 April 2021
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja; dan 2. Membahas Isu-isu Aktual Lainnya.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 32 (tiga puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan agenda membahas evaluasi pelaksanaan program kerja dan membahas isu-isu aktual lainnya, hari Selasa, 6 April 2021, dibuka pukul 13.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan agenda membahas evaluasi pelaksanaan program kerja dan membahas isu-isu aktual lainnya, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-557.1/MK.02/2019 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.432/M.PPN/D.8.KU.01.01/07/2019 hal Pagu Alokasi Anggaran TA 2020, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp216.998.054.000,- (*dua ratus enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah*). Namun berkenaan dengan masa darurat pandemi COVID19 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran BPIP Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.193.038.924.000,- (*seratus sembilan puluh tiga milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

2. Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI nomor S-302/MK.02/2020 tentang langkah-langkah penyesuaian Belanja 3 Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2020, alokasi anggaran BPIP kembali mengalami penurunan yang kedua kalinya menjadi Rp.160.050.978.000,- (*seratus enam puluh milyar lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
3. Berdasarkan pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2020 sebesar Rp.160.050.978.000,00 (*Seratus enam puluh milyar lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) sampai dengan 31 Desember 2020 dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp.148.426.255.014,- (*seratus empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu empat belas rupiah*) atau sebesar 92,74% (*sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat persen*).
4. Kendala atau hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Kondisi Pandemi Covid19 yang menyebabkan perubahan metode pelaksanaan kegiatan;
  - b. Lambatnya penyerapan anggaran sebagai konsekuensi Kebijakan pemerintah terkait refocusing anggaran pada seluruh Kementerian/Lembaga dalam rangka penanggulangan Covid19;
  - c. Kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
  - d. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada BPIP yang belum sesuai kebutuhan ideal untuk menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundangundangan.
5. Berdasarkan pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2021 sebesar Rp171.781.392.000 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), capaian realisasi anggaran pada Tahun 2021 pada triwulan 1 (satu) periode Januari sampai dengan Maret sebesar Rp.21.138.233.061 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah*) atau sebesar 12,31% (*Dua Belas Koma Tiga Puluh Satu Persen*).

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan agenda membahas evaluasi pelaksanaan program kerja dan membahas isu-isu aktual lainnya, yaitu:

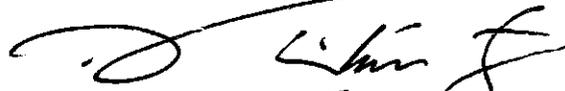
1. Komisi II DPR RI meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar memberikan dukungan anggaran yang cukup kepada BPIP untuk melakukan penguatan program pengarusutamaan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan menetapkan kebijakan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar bagi pelajar dan mahasiswa di jenjang pendidikan formal mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi.
2. Komisi II DPR RI meminta BPIP melakukan sinergi dan kerja sama dengan Komisi II DPR RI, Kementerian, Lembaga Negara, serta Pemerintah Daerah agar program-program sosialisasi dalam rangka mengarusutamakan nilai-nilai Ideologi Pancasila dikalangan masyarakat dapat lebih masif.
3. Komisi II DPR RI mendesak BPIP melakukan penyusunan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila yang salah satu outputnya adalah modul dan materi pendidikan non formal bagi seluruh elemen masyarakat.
4. Komisi II DPR RI meminta BPIP untuk menyerahkan draft bahan ajar Pancasila Pendidikan formal bagi pelajar dan mahasiswa kepada Komisi II DPR RI untuk dilakukan uji materi sebelum disebarluaskan.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 6 April 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270